

Volume 17 Nomor 01, Januari 2024

P-ISSN: 1979-1712, E-ISSN: 2829-0615

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money

¹Wayan Anggita Suridiyanti, ²Haliah, ³Nurleni

¹ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: wayananggita01@gmail.com

² Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: haliah_feuh@yahoo.com

³ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: lenijamaluddin@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine the performance of the Kolaka Regency Regional Government for the 2019-2021 period using the Value for Money principle. Data analysis was carried out using the Kolaka Regency Regional Government's financial reports and then analyzed using ratios containing Value For Money, including economics, effectiveness and efficiency. Measurements using this method require data from the Regional Budget and Revenue and Expenditure reports for the required period, where this report is taken from the Kolaka Regency regent's office. The results of this research show that the performance of the Kolaka Regency Regional Government for the 2019-2021 period based on economic ratios is already economical, because the realization of regional expenditure is smaller than budgeted, then based on the effectiveness ratio it is considered effective, even though the realization of regional income is still smaller than budgeted, However, the difference is not that big, and if viewed from the efficiency ratio, it is not efficient because the realization of regional expenditure is still greater than the realization of regional income, resulting in a deficit.*

Keywords: *Performance Measurement; Value for Money; Economic Ratios; Effectiveness Ratio; Efficiency Ratio*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka periode tahun 2019-2021 menggunakan prinsip Value for Money. Analisis data dilakukan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka kemudian dianalisis menggunakan rasio yang terdapat Value for Money diantaranya ekonomis, efektivitas dan efisiensi. Pengukuran dengan menggunakan metode ini memerlukan data dari laporan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selama periode yang dibutuhkan, dimana laporan ini diambil dari kantor bupati Kabupaten Kolaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka periode tahun 2019-2021 berdasarkan rasio ekonomi sudah ekonomis, karena realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan, kemudian berdasarkan rasio efektivitas sudah termasuk efektif, walaupun realisasi pendapatan daerah masih lebih kecil dari yang dianggarkan, namun selisihnya tidak begitu besar, dan jika ditinjau dari rasio efisiensi tidak efisien karena realisasi belanja daerah masih lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah sehingga terjadi defisit.

Kata kunci: Pengukuran Kinerja; Value for Money; Rasio Ekonomis; Rasio Efektivitas; Rasio Efisiensi

1. Pendahuluan

Dampak akuntansi dalam bidang sektor publik di negara Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, sejalan dengan penerapan otonomi daerah oleh pemerintah Indonesia. “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini tentunya berdampak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang merupakan salah satu daerah otonom.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah sudah dijelaskan tentang Daerah Otonom. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebenarnya sudah dijabarkan bahwa menjalankan pemerintahan, daerah diberikan kekuasaan penuh untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah. Karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat maka tentunya penting untuk melakukan pengukuran kinerja pada pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya.

Pengukuran kinerja penting dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi bagi pemerintah daerah maupun satuan kerja guna peningkatan pelayanan publik, kinerja maupun akuntabilitasnya, hal ini juga sesuai dengan penilaian yang disampaikan oleh Mardiasmo (2018: 151) yang menegaskan bahwasanya pengukuran kinerja berfungsi untuk mengukur serta memberi penilaian terhadap prestasi manajer serta unit-unit organisasi yang berada dibawah naungannya. Penilaian kinerja ini sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu bentuk kajian yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah ataupun satuan dinas dalam upaya mencapai tujuannya. Selain sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja juga sebagai salah satu bentuk kontrol agar apa yang dianggarkan oleh pemerintah sesuai dengan yang telah direalisasikan.

Kinerja pemerintah daerah banyak kinerjanya yang kurang baik, baik itu pada dinas-dinas maupun pemerintah pusat itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dari beberapa penelitian yang melakukan kajian tentang bagaimana kinerja pemerintah. Adanya pengukuran kinerja maka pemerintah dituntut untuk mempunyai nilai kinerja yang bagus. Dalam upaya memiliki kinerja yang baik pemerintah diharuskan untuk mencapai target maupun tujuan yang telah dibuat. Pada saat pengukuran kinerja dilakukan, capaian dari program kerja yang telah dilakukan inilah yang akan dijadikan bahan untuk nantinya dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja penting dilakukan guna menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah apakah sudah mencapai target ataupun harus ada yang lebih ditingkatkan lagi. Pemanfaatan prinsip Value for Money yang

menggabungkan efisiensi, ekonomi, dan efektivitas merupakan salah satu metode pengukuran kinerja yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.

Value for Money dapat diartikan sebagai prinsip pengendalian di sektor publik yang berlandaskan efisiensi, ekonomi, dan efektivitas (Majid, 2019:18). Dalam sistem otonomi daerah, prinsip ini digunakan untuk mendorong tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana dan keuangan daerah, gagasan evaluasi kinerja berbasis Value For Money mutlak diperlukan. Salah satu capaian yang harus selalu dijunjung tinggi oleh pemerintah daerah dan unit layanan terkait adalah keuangan daerah yang sehat. Majid (2019:20), suatu organisasi dikatakan mencapai value for money jika telah menerapkan output yang optimal dengan biaya input yang serendah-rendahnya guna mencapai tujuan organisasi. Penerapan prinsip value for money diduga berpotensi meningkatkan baik akuntansi maupun kinerja di sektor publik. Kemampuan untuk meningkatkan nilai efektifitas dalam pelayanan publik dengan memastikan pelayanan yang diberikan tepat sasaran dan alokasi anggaran belanja lebih terfokus pada kepentingan publik merupakan dua keuntungan pengaplikasian prinsip value for money dalam organisasi sektor publik.

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengukuran kinerja yang memanfaatkan penerapan prinsip Value For Money dilakukan oleh Ade Khairunnisa (2021), Nur Zeni Amalia Putri (2020) dan Yosie Dwinanda (2018). Penelitiannya menggambarkan dengan jelas bahwa ketika berbicara tentang pengukuran kinerja efisiensi, ekonomi dan efektivitas menggunakan Value for Money dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, tidak selalu berkinerja baik. Misalnya, kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dari tahun 2013 hingga 2017 cukup memuaskan. Sementara itu, kinerja Dinas Pendidikan Yogyakarta efisien tidak optimal dalam hal efisiensi, dan efektivitas kinerja Dinas Pendidikan Yogyakarta tidak efektif.

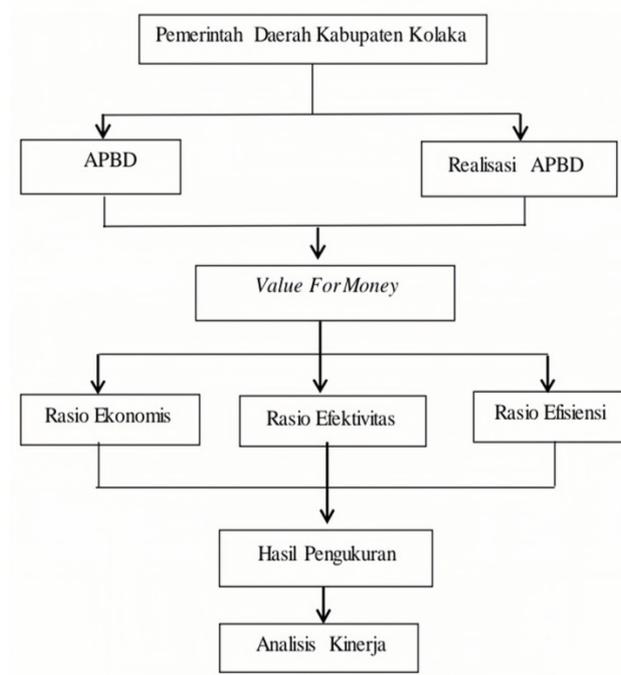
Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan penelitian yang memiliki cakupan lebih luas tentang pengukuran kinerja dengan menerapkan prinsip Value for Money. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah di Kabupaten Kolaka, berangkat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan pada Dinas di daerah tertentu. Tujuannya adalah agar dapat diketahui bagaimana hasil kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang dilihat dari aspek efisiensi, ekonomi dan efektivitas.

Mardiasmo (2018:160) Dalam organisasi pemerintahan, pengukuran kinerja pada dasarnya didasarkan pada value for money. Kinerja pemerintah dinilai tidak hanya berdasarkan output saja, tetapi juga input, output, dan outcome secara keseluruhan. Value for Money sebagaimana didefinisikan oleh Ihyaul Ulum (2009:24) adalah suatu pendekatan pengukuran kinerja yang memperhitungkan tidak hanya aspek keuangan (teliti) dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, tetapi juga aspek efisiensi (efektivitas) penggunaan sumber daya, yang berarti penggunaannya diminimalkan sedangkan hasilnya dimaksimalkan

(memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya), dan efektif (efektif) dalam arti harus mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rancangan penelitian untuk penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2012:13) Pendekatan penelitian deskriptif bertujuan untuk menentukan nilai suatu variabel bebas, apakah itu satu atau lebih (independen), tanpa membandingkannya dengan variabel lain atau membangun hubungan di antara mereka. Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2021, yang diperoleh dari Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka, merupakan data sekunder yang dirujuk dalam penelitian ini. Dalam upaya menjalankan pemerintahan daerah yang efisien, APBD memberikan gambaran tentang hak serta kewajiban daerah, yang bisa dievaluasi secara finansial, meliputi kekayaan dan tanggung jawab pemerintah dalam setahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bagian dari berbagai dokumen keuangan penting yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Anggaran yang tertuang dalam APBD menjadi acuan dan juga landasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan juga dalam melaksanakan pembangunan (Sumarsono, 2010:49).

APBD juga dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang digunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga mewujudkan pelayanan publik bagi terselenggaranya tujuan negara. wilayah. Struktur APBD terdiri dari tiga bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

2. Metode Penelitian

Metode deskriptif kuantitatif adalah jenis analisis yang menggunakan rasio-rasio dalam prinsip Value for Money untuk memberikan gambaran atau gambaran tentang data yang dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka diukur dengan menggunakan prinsip ini sehingga rasio ekonomi, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi bisa dimanfaatkan dalam menentukan tingkat kinerja keuangan pada pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis informasi kuantitatif. Danang Sunyoto (2013:21) Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan sebagai angka mutlak atau angka yang mudah dibaca. Laporan APBD Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Laporan Realisasi APBD dijadikan sebagai data kuantitatif kajian. Metode deskriptif kuantitatif adalah jenis analisis yang menggunakan rasio-rasio dalam prinsip Value For Money untuk memberikan gambaran atau gambaran tentang data yang dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka diukur dengan menggunakan prinsip ini sehingga rasio ekonomi, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi bisa dimanfaatkan dalam menentukan tingkat kinerja keuangan pada pemerintah daerah di masa yang akan datang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 Gambaran umum Kabupaten Kolaka secara administratif memiliki luas wilayah 2.958,69 km² Pada pengetahuan saya hingga September 2021, Kabupaten Kolaka adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten Kolaka saat ini terbagi menjadi 12 Kecamatan, 100 desa dan 35 kelurahan. Luas Wilayah daratan Kabupaten Kolaka adalah 2.958,69 km² dan perairan laut seluas ± 15.000 km² dengan panjang garis pantai 293,45 km. Kecamatan Samaturu adalah kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 659,08 km² atau 22,28% dari total luas Kabupaten Kolaka sedangkan Kecamatan Toari merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 105,37 km² atau 3,56% dari total luas Kabupaten Kolaka.

Kabupaten Kolaka tepatnya berada di 3°37'-4°38' Lintang Selatan dan 121°05'-121°46' Bujur Timur, tepatnya di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara. Posisi memanjang ini memanjang dari utara ke selatan. Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, dapat dengan mudah dicapai melalui jalur darat (Trans Sulawesi), laut (Ferry Bajoe-Kolaka dan Feri Tobaku-Siwa), atau udara (Bandara Sangia Nibandera, Kolaka). Kabupaten Kolaka berjarak kurang lebih 165 kilometer.

3.2. Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis value for money (VFM) adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu proyek atau program memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Rasio ini membantu dalam mengidentifikasi apakah suatu proyek atau program memberikan hasil yang memadai dalam konteks ekonomi. Ekonomi adalah upaya menghemat uang dengan membeli barang dan jasa input dengan kualitas tertentu dengan biaya serendah mungkin. Konsep ekonomi secara keseluruhan juga sering disebut sebagai penghematan, yang juga mencakup pengelolaan yang bijaksana (prudence), kehati-hatian, dan menghindari pemborosan.

Mahmudi menegaskan (2013: 83), ekonomi terkait dengan konversi nilai input menjadi sumber daya keuangan (uang atau tunai), yang kemudian menjadi input sekunder seperti infrastruktur, material, tenaga kerja, dan barang modal yang digunakan oleh organisasi. Konsep biaya yang digunakan untuk menghitung nilai input sangat erat kaitannya dengan konsep ekonomi. Nilai ekonomi ini mengakui bahwa sumber daya input harus diperoleh dengan harga yang mendekati harga pasar, yang berarti pengeluaran lebih sedikit. Secara metodis, masalah keuangan merupakan pemeriksaan antara input dan nilai rupiah untuk mendapatkan sumber data tersebut. Berikut adalah rumus untuk mengukur rasio ekonomis Mahmudi (2013: 83):

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Dalam proses pengolahan data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dilakukan dengan memasukkan nilai yang terlapor dalam laporan realisasi APBD kedalam rasio ekonomi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp. 1.276.340.969.550,00}}{\text{Rp. 1.369.795.381.847,42}} \times 100\% \\ &= 93,17\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp. 1.245.348.396.132,00}}{\text{Rp. 1.362.657.747.967,37}} \times 100\% \\ &= 91,39\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp. 1.263.922.249.786,00}}{\text{Rp. 1.348.055.405.827,00}} \times 100\% \\ &= 93,75\% \end{aligned}$$

Tabel 1 Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka 2019-2021

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Persentase
2019	Rp. 1.369.795.381.847,42	Rp. 1.276.340.969.550,00	93,17%
2020	Rp. 1.362.657.747.967,37	Rp. 1.245.348.396.132,00	91,39%
2021	Rp. 1.348.055.405.827,00	Rp. 1.263.922.249.786,00	93,75%

Tabel 2 Kriteria Ekonomis kinerja keuangan dan persentase kinerja keuangan

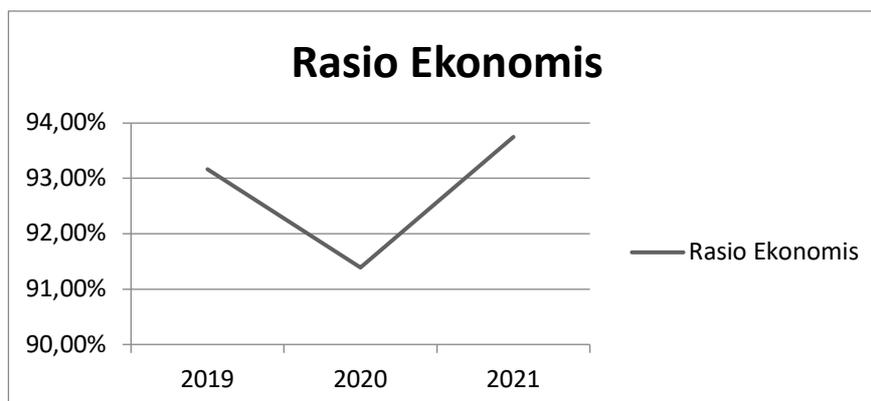
Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 100%	Ekonomis
Sama dengan 100%	Ekonomis berimbang
Lebih dari 100%	Tidak Ekonomis

Rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka menggambarkan pergerakan yang berbeda setiap tahunnya, namun secara keseluruhan dari rentang tahun 2019-2021 rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka termasuk dalam kategori ekonomis. Pada tahun 2019 rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka berada pada persentase 93,17% dimana nilai ini masih termasuk kategori ekonomis. Kemudian pada tahun 2020 rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mengalami penurunan sebesar 1,78% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 91,39%. Selanjutnya pada tahun 2021 nilai rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 93,75%, ini berarti bahwa terjadi peningkatan sebesar 2,36%.

Pergerakan nilai rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka selama 3 tahun (2019-2020) tidak ada perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari selisih nilai rasio ekonomis tiap tahun yang tidak begitu besar yaitu dikisaran 91% - 94%. Anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka juga tiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran yang nilainya tersaji pada tabel 4.1, hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka telah mampu melakukan penghematan belanja setiap tahunnya pada rentang tahun 2019-2021. Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami fluktuatif, dengan melakukan perhitungan menggunakan rasio ekonomis dapat dilihat seberapa besar tingkat ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dengan melakukan perbandingan realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka selama 3 tahun (2019-2021) yang ditampilkan pada tabel 4.1 serta kecocokannya dengan tabel 4.2 yang merupakan kriteria kinerja keuangan dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten kolaka sebesar 93,17% dimana berdasarkan kriteria kinerja pada tabel 4.2 termasuk dalam kategori ekonomis. Kemudian, pada tahun 2020 rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 91,39% dimana ini termasuk dalam

kategori ekonomis. Selanjutnya, pada tahun 2021 rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 93,75% yang artinya nilai ini termasuk dalam kategori ekonomis.



Gambar 2 Grafik Rasio Ekonomis

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka menggambarkan pergerakan yang berbeda setiap tahunnya, namun secara keseluruhan dari rentang tahun 2019-2021 rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka termasuk dalam kategori ekonomis. Pada tahun 2019 rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka berada pada persentase 93,17% dimana nilai ini masih termasuk kategori ekonomis. Kemudian pada tahun 2020 rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mengalami penurunan sebesar 1,78% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 91,39%. Selanjutnya pada tahun 2021 nilai rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 93,75%, ini berarti bahwa terjadi peningkatan sebesar 2,36%.

3.3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas value for money (VFM) adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu proyek atau program mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dalam konteks biaya yang dikeluarkan. Rasio ini membantu dalam mengidentifikasi apakah proyek atau program tersebut berhasil dalam memberikan manfaat yang diharapkan dalam hubungannya dengan biaya yang dikeluarkan. Kisaran dampak dan hasil output program dalam hal pencapaian tujuan program digambarkan oleh indikator efektivitas ini. Proses kerja suatu unit organisasi semakin efisien semakin memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Berikut adalah rumus untuk mengukur rasio efektivitas Mahmudi (2013: 86):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Dalam proses pengolahan data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dilakukan dengan memasukan nilai yang terlapor dalam laporan realisasi APBD kedalam rasio ekonomi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 1.285.755.399.074,95}}{\text{Rp. 1.333.673.165.027,00}} \times 100\%$$

$$= 96,40\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. 1.217.655.405.935,69}}{\text{Rp. 1.320.689.584.985,00}} \times 100\%$$

$$= 92,19\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp. 1.312.684.406.143,32}}{\text{Rp. 1.334.565.745.518,00}} \times 100\%$$

$$= 98,36\%$$

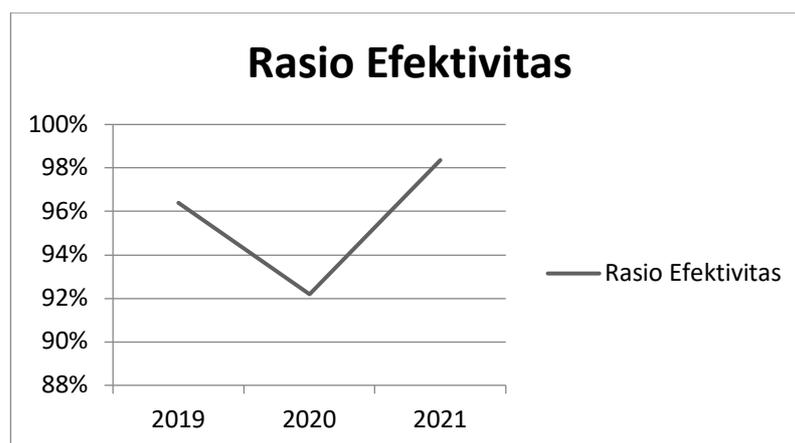
Tabel 3 Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka 2019-2021

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase
2019	Rp.1.333.673.165.027,00	Rp.1.285.755.399.074,95	96,40%
2020	Rp.1.320.689.584.985,00	Rp.1.217.655.405.935,69	92,19%
2021	Rp.1.334.565.745.518,00	Rp.1.312.684.406.143,32	98,36%

Tabel 4 Kriteria Efektivitas kinerja keuangan dan persentase kinerja keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka selama 3 tahun (2019-2021) yang ditampilkan pada tabel 4.3 serta kecocokannya dengan tabel 4.4 yang merupakan kriteria kinerja keuangan dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten kolaka sebesar 96,40% dimana berdasarkan kriteria kinerja pada tabel 4.4 termasuk dalam kategori efektif. Kemudian, pada tahun 2020 rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 92,19% dimana ini termasuk dalam kategori efektif. Selanjutnya, pada tahun 2021 rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 98,36%% yang artinya nilai ini juga termasuk dalam kategori efektif.



Gambar 3 Grafik Rasio Efektivitas

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka menggambarkan pergerakan yang berbeda setiap tahunnya. Bisa dilihat bahwa dimulai pada tahun 2019 persentase rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 96,40% dimana nilai ini berdasarkan kriteria masuk dalam kategori efektif. Kemudian ditahun selanjutnya yaitu 2020 rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mengalami penurunan sebesar 4,21%, dimana pada tahun ini rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 92,19%, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2020 namun berdasarkan kriteria nilai 92,19% ini masih termasuk dalam kategori efektif. Selanjutnya pada tahun 2021 rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mengalami peningkatan sebesar 6,17% dimana pada tahun ini rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 98,36% yang termasuk dalam kategori efektif.

Rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka menggambarkan pergerakan yang berbeda setiap tahunnya. Bisa dilihat bahwa dimulai pada tahun 2019 persentase rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 96,40% dimana nilai ini berdasarkan kriteria masuk dalam kategori efektif. Kemudian ditahun selanjutnya yaitu 2020 rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mengalami penurunan sebesar 4,21%, dimana pada tahun ini rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 92,19%, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2020 namun berdasarkan kriteria nilai 92,19% ini masih termasuk dalam kategori efektif. Selanjutnya pada tahun 2021 rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mengalami peningkatan sebesar 6,17% dimana pada tahun ini rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 98,36% yang termasuk dalam kategori efektif.

Anggaran pendapatan pada tahun 2019 dan 2021 mengalami peningkatan yang juga dibarengi dengan peningkatan realisasi pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2020 anggaran pendapatan daerah mengalami penurunan yang diikuti dengan penurunan realisasi pendapatan daerah. Pada tahun 2020 persentase dari hasil rasio efektivitas juga merupakan

yang terendah yaitu 92,19% dibandingkan pada tahun 2019 dan 2021 yaitu 96,40% dan 98,36%.

Jika dilihat dari rentang tahun 2019-2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka tidak pernah dapat merealisasikan 100% anggaran pendapatan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dan anggaran pendapatannya tiap tahun. Namun, walaupun tidak 100% dapat direalisasi, pencapaian Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam merealisasikan anggarannya sudah termasuk dalam kategori efektif.

3.4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi value for money (VFM) adalah suatu indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu proyek atau program pemerintah memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Rasio ini membantu dalam mengukur apakah penggunaan dana publik untuk suatu proyek atau program telah efisien dan memberikan nilai yang optimal bagi masyarakat. Dari perspektif sistemik, efisiensi adalah perbandingan output dan input, atau output per unit input. Suatu kegiatan, program, atau organisasi dikatakan efisien jika dapat menghasilkan output tertentu dengan input yang sesedikit mungkin atau paling banyak dengan input yang sesedikit mungkin (good spending). Berikut adalah rumus untuk mengukur rasio efisiensi Mahmudi (2013: 85):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Dalam proses pengolahan data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dilakukan dengan memasukan nilai yang terlapor dalam laporan realisasi APBD kedalam rasio ekonomi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp. 1.276.340.969.550,00}}{\text{Rp. 1.285.755.399.074,95}} \times 100\% \\ &= 99,26\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp. 1.245.348.396.132,00}}{\text{Rp. 1.217.655.405.935,69}} \times 100\% \\ &= 102,27\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp. 1.263.922.249.786,00}}{\text{Rp. 1.312.684.406.143,32}} \times 100\% \\ &= 96,28\% \end{aligned}$$

Tabel 5 Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka 2019-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase
2019	Rp.1.276.340.969.550,00	Rp.1.285.755.399.074,95	99,26%
2020	Rp.1.245.348.396.132,00	Rp.1.217.655.405.935,69	102,27%
2021	Rp.1.263.922.249.786,00	Rp.1.312.684.406.143,32	96,28%

Tabel 6 Kriteria Efisiensi kinerja keuangan dan persentase kinerja keuangan

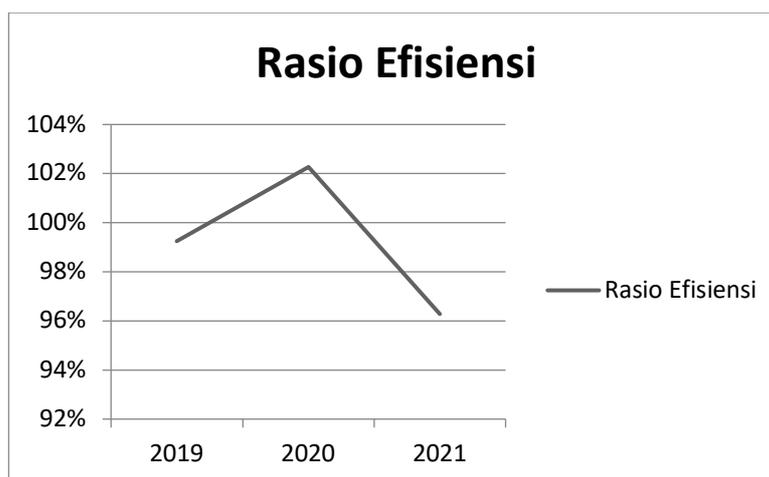
Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka selama 3 tahun (2019-2021) yang ditampilkan pada tabel 4.5 serta kecocokannya dengan tabel 4.6 yang merupakan kriteria kinerja keuangan dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten kolaka sebesar 99,26% dimana berdasarkan kriteria kinerja pada tabel 4.6 termasuk dalam kategori kurang efisien. Kemudian, pada tahun 2020 rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 102,27% dimana ini termasuk dalam kategori tidak efisien. Selanjutnya, pada tahun 2021 rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 96,28% yang artinya nilai ini termasuk dalam kategori kurang efisien.

Realisasi belanja daerah setiap tahunnya selalu mengalami perubahan. Pada tahun 2019 persentase rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 99,26% yang termasuk dalam kategori kurang efisien, walaupun sebenarnya pada tahun 2019 realisasi pendapatan daerah sudah lebih besar daripada realisasi belanja daerah namun nilainya tidak cukup signifikan. Kemudian pada tahun 2020 persentase rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 102,27% yang termasuk dalam kategori tidak efisien, hal ini dikarenakan realisasi belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah. Selanjutnya, pada tahun 2021 persentase rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 96,28% dimana ini termasuk dalam kategori kurang efisien, walaupun sebenarnya realisasi pendapatan daerah sudah lebih besar dibandingkan realisasi belanja daerah.

Jika dilihat dari rentang waktu 2019 sampai dengan 2021 rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang paling mendekati efisien adalah pada tahun 2021 dimana persentase rasio efisiensinya sebesar 96,28%, walaupun sebenarnya ini masuk dalam kategori kurang efisien namun dibandingkan tahun 2019 dan 2020 ini yang paling baik.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka selama 3 tahun (2019-2021) yang ditampilkan pada tabel 4.5 serta kecocokannya dengan tabel 4.6 yang merupakan kriteria kinerja keuangan dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten kolaka sebesar 99,26% dimana berdasarkan kriteria kinerja pada tabel 4.6 termasuk dalam kategori kurang efisien. Kemudian, pada tahun 2020 rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 102,27% dimana ini termasuk dalam kategori tidak efisien. Selanjutnya, pada tahun 2021 rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 96,28% yang artinya nilai ini termasuk dalam kategori kurang efisien.



Gambar 4 Grafik Rasio Efisiensi

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 rasio efisisinsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebesar 99,26% dimana berdasarkan kriteria nilai ini masuk dalam kategori kurang efisien. Kemudian ditahun 2020 rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mengalami peningkatan nilai rasionya sebesar 3,01% dari tahun sebelumnya, sehingga nilai rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka pada tahun 2020 sebesar 102,27%, namun nilai rasio yang melebihi 100% dalam kriteria efisiensi kinerja termasuk dalam kategori tidak efisien. Kemudian pada tahun 2021 nilai rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mengalami penurunan sebesar 5,99% dimana pada tahun 2021 nilai rasionya sebesar 96,28% nilai ini termasuk dalam kategori kurang efisien. Secara keseluruhan jika dilihat dari tahun 2019 sampai dengan 2021 kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka tidak pernah efisien.

4. Kesimpulan

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka periode tahun 2019-2021 berdasarkan perhitungan menggunakan rasio ekonomi sudah ekonomis, karena realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan. Selanjutnya kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka periode tahun 2019-2021 berdasarkan perhitungan menggunakan rasio efektivitas sudah termasuk efektif, walaupun realisasi pendapatan daerah masih lebih kecil dari yang dianggarkan, namun selisihnya tidak begitu besar dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka periode tahun 2019-2021 berdasarkan perhitungan menggunakan rasio efisiensi tidak efisien karena realisasi belanja daerah masih lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah sehingga terjadi defisit.

Penelitian terbatas pada realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi satu-satunya fokus kajian ini. Akan lebih baik jika peneliti selanjutnya menambah rentang waktu untuk pengukuran yang lebih akurat dan juga memperluas lingkup instansi yang dijadikan objek agar dapat dilihat bagaimana keterbandingan kinerja antara instansi satu dengan yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Asari, N. M. A., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(2), 877-904.
- Cipta, W. (2014). Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Berdasarkan Value for Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011. *E-Journal Bismal*, 2(1), 35-42.
- Harindra, I., & Sapari, S. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Konsep Value For Money pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, 6(1), 1-10.
- Khairunnisa, A. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Kasus pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara). *Skripsi*. (Doctoral dissertation, UMSU).
- Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Gowa Sulawesi Selatan: Pustaka Almaid
- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
- _____ (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- _____ (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nurafifah, I. P., Haliah, H., & Nirwana, N. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan Value for Money (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 66-72.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024.
- _____ Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Online), (<https://peraturan.bpk.go.id/> diakses 5 November 2022)
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Sunyoto, D. (2013). Metodologi penelitian akuntansi. Bandung : Refika Aditama

P-ISSN: 1979-1712, E-ISSN: 2829-0615

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Online), (<https://peraturan.bpk.go.id/> diakses 3 November 2022)